

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie Habib, 2014, *Politik Hukum Kenotariatan*, Bahan Bacaan Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
- Budiono Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum, ALUMNI*, Bandung.
- Gautama, Sudargo 1995, *komentar atas undang – undang perseroan terbatas tahun 1995 no. 1 perbandingan dengan peraturan lama*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Hanitijo Soemitro Ronny, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Isnaini Wahyu Utomo Hatta dan Imam, Safi'i, *Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta*, Jurnal Res Judicata, Vol. 2 No. 2, 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cetakan ke empat, Balai Pustaka.
- Lumban Tobing G.H.S, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Moechthar Oemar, 2019, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, Air Langga Press, Surabaya
- Moleong Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhammad Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Pramono Nindyo, 2005, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*. Yogyakarta. TPK Gunung Mulia
- Prasetya Rudhi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti,

Prasetya Rudhi, 2002, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Bandung, PT. Citra

Aditya Bakti

Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Jakarta,

Kansil C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Hukum Dagang Menurut Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Khud) Dan Kitab Undang Hukum Perdata (Kuhper)*. buku kesatu, Sinar Grafika, Jakarta.

Purwosutjipto H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Jilid 2, Jakarta, Djambatan

R, Murjoyanto, 2002, *Pengantar Hukum Dagang: Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta, Liberty

Rahardja Hadhikusuma R.T, Sutantya, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Rahardja Hadhikusuma R.T. Sutantya, dan Sumantoro, 2003, *Pengertian pokok hukum perusahaan: bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press, 1991

Ridwan Widyadharma Ignatius, 2001, *Etika Profesi Hukum Dan Keperanannya*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

S. Gandasubrata H.R. Purwoto, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta

Sembiring Sentosa, 2004, *Hukum Dagang*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti

Soekanto Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tedjosaputro Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.

Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja, 1999, *Perseroan Terbatas*, PT. Rajagrafindo Persada

UNDANG UNDANG

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pendirian dan Persetujuan Perubahan

Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2128

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 990.

Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

JURNAL

A.G. lubbers dalam Dessy Dwi Astuti, 2010, “Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang

Artha Ully Tambunan, 2020, “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha Swasta Yang Dilarang Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara.

Emi Sugiarty, 2015, “Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha ”, Program Magister Kenotariatan, Universitas Narotama

Felly Faradina, 2011, “Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”, Tesis, Universitas Indonesia.

Fitriyana, 2010, “Notaris Yang Berkedudukan Sebagai Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas ”, program magister kenotariatan, universitas Airlangga

G. Iubbers dalam Dessy Dwi Astuti, 2010, *Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok

C.M.J. Mostart dalam Dessy Dwi Astuti, 2010, *Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok

Wolthuis dalam Dessy Dwi Astuti, 2010, *Rangkap Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok

INTERNET

Jurnal Entrepreneur, “Bentuk – Bentuk Badan Usaha Swasta”,

<https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-badan-usaha/>, diakses pada Tanggal 19 Juni 2021, Pukul : 13:40 WIB.

Hukum online, *Hukum tukar jabatan sekutu aktif dan sekutu pasif*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9b235d3752f/hukumnya-tukar-jabatan-antara-sekutu-aktif-dan-pasif-dalam-cv>,

Hukum online, *Cara Membedakan Sekutu Aktif Dan Sekutu Pasif Dalam Sebuah Cv*,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6688/cara-membedakan-sekutu-aktif-dan-sekutu-pasif-pada-cv>